

**TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP
PERATURAN GUBERNUR BALI PROVINSI BALI NO. 1 TAHUN
2020 TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI
KHAS BALI MENURUT PERPRES NO 39 TAHUN 2014**

SKRIPSI

Oleh:

MA'RIFATUL AINIYAH

NIM: C85214037



**Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Fakultas Syari'ah dan Hukum
Jurusan Hukum Publik Islam
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
Surabaya
2021**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Ma'rifatul Ainiyah
Nim : C85214037
Fakultas/Jurusan/Prodi : Syari'ah dan Hukum/Hukum Publik Islam/Hukum Tata Negara
Judul skripsi : Tinjauan Fiqh Siyasah terkait Peraturan Gubernur Provinsi Bali No 1 Tahun 2020 tentang "Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali terhadap Perpres No 39 Tahun 2014"

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian karya saya sendiri, kecuali pada bagian- bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 24 Februari 2021

Yang menyatakan



Ma'rifatul Ainiyah
NIM C85214037

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang ditulis oleh Ma'rifah Ainiyah NIM C85214037 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqosahkan.

Surabaya, 12 Februari 2021

Pembimbing

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Dr. Sri Warjiati', written in a cursive style.

Dr. Sri Warjiati, SH., MH

NIP: 196808262005012001

PENGESAHAN

Skripsi yang oleh Ma'rifatul Ainiyah NIM. C85214037 ini telah dipertahankan di depan sidang Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Senin tanggal 01 Maret 2021 dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan salah satu program sarjana strata satu dalam Ilmu Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi

Penguji I,



Dr. Sri Warjiati, SH., MH
NIP.196808262005012001

Penguji II,



Dr. Muwahid Sh. M.Hum
NIP.19803102005011004

Penguji III,



Ikhsan Fatah Yasin, SH. MH
NIP.198905172015031006

Penguji IV,



Achmad Safiuddin R. M.H
NIP. 199212292019031005

Surabaya, 23 Juni 2021

Mengesahkan,

Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel
Dekan,



DDD Masruhan, M.Ag.
NIP. 19590404198803100



UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA

KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300
E-Mail: perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Ma'rifatul Ainiyah
NIM : C85214037
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum / Hukum Tata Negara
E-mail address : ainiyah.rifa7@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah :

☒ Skripsi ☐ Tesis ☐ Desertasi ☐ Lain-lain (.....)

yang berjudul :

Tinjauan Fiqh Siyasah الدستورية terhadap Peraturan Gubernur
Bali No.1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi
khas Bali menurut PERPRES No. 39 Tahun 2014.

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih-media/format-kan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikannya, dan menampilkan/mempublikasikannya di Internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 8 Oktober 2025.

Penulis

(Ma'rifatul Ainiyah)
nama terang dan tanda tangan

ABSTRAK

Skripsi dengan judul Tinjauan Fiqh Siyasah Dusturiyah Terhadap Peraturan Gubernur Bali Provinsi Bali No. 1 Tahun 2020 tentang tata kelola minuman fermentasi dan/atau destilasi khas bali. Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Khas Bali Menurut Perpres No 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. ini untuk menjawab pertanyaan: 1. Bagaimana analisis terhadap pergub Provinsi Bali No 1 tahun 2020 tentang Tata Kelola minuman fermentasi khas Bali menurut Perpres No 39 tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal dan 2. Bagaimana analisis fiqh siyasah dusturiyah terhadap peraturan gubernur provinsi Bali No 1 tahun 2020 tentang tata kelola minuman khas Bali.

Data penelitian ini dihimpun menggunakan teknik library research dan pendekatan statute approach. Teknik analisis data menggunakan deskriptif deduktif yang selanjutnya akan disusun secara sistematis sehingga menjadi data yang konkrit mengenai Peraturan Gubernur Bali Provinsi Bali No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Khas Bali Menurut Perpres No 39 Tahun 2014.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa, *pertama* suatu hukum yang lebih khusus dapat dimenangkan bentuk aturannya dibandingkan hukum yang umum (*lex specialis derogate legi generalis*). Adanya Pergub No.1 Tahun 2020 ini tidak menghapuskan hukum yang terdapat pada Perpres No. 39 Tahun 2014 tentang daftar bidang usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Dengan demikian rancangan peraturan gubernur yang akan disusun sebelum ditetapkan oleh gubernur agar diupayakan memenuhi unsur “perintah peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi” atau berdasarkan kewenangan, karena apabila salah satu dari keduanya tidak terpenuhi berdasarkan ketentuan Pasal 8 ayat (2) UU No 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, konsekuensi yuridisnya pembentukan peraturan gubernur tersebut tidak diakui keberadaannya dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. *Kedua* minuman fermentasi dibali menjadi bahan olahan yang turun menurun, menjadi kebutuhan dalam peribadahan juga dalam pola kehidupan sehari-hari masyarakat Bali, dan menjadikan produk dalam negeri yang berani bersaing dengan produk impor yang lebih dulu legal. Tentunya menumbuhkan regulasi yang mendukung industri dalam negeri dalam persaingan pasar nasional. Sehingga dapat ditegaskan bahwa keberadaan peraturan gubernur Provinsi Bali terkait tata kelola minuman fermentasi dikatakan sebagai hukum yang layak diterapkan di masyarakat Bali, juga telah menerapkan konstruksi pembentukan suatu hukum. Mengacu pada sumber aturannya yakni pelestarian budaya serta pengembangan usaha kecil milik masyarakat bawah. Yang secara langsung meningkatkan taraf hidup mereka.

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
PENGESAHAN.....	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TRANSLITERASI	xi
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	7
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka	8
E. Tujuan dan Penelitian.....	12
F. Kegunaan Penelitian.....	12
G. Defenisi Operasional	13
H. Metode Penelitian.....	15
I. Sistematika Pembahasan	17
BAB II KERANGKA TEORITIK	
A. Minuman Beralkohol	20
B. Perspektif hukum Positif tentang Minman Keras	20
a. Perspektif hukum Pidana tentang Minman Keras	20
b. Perpres nomer 39 tahun 2014.....	22
c. Perpes nomer 74 tahun 2013	23
d. Permen RI Nomer: 43/M-Dag/ Per/ 9/ 2009	27
C. Peraturan Daerah.....	29
a. Pemerintahan daerah berdasarkan UU No. 32 tahun 2004	29
b. Kerangka dasar peraturan perundang-undangan	32
D. Konsep Fiqh Siyasah.....	34

	a. Pengertian fiqh Siyasah.....	34
	b. Ruang lingkup Fiqh Siyasah	36
	c. Pengertian Fiqh Dusturiyah.....	37
	d. Sumber Hukum Fiqh Dusturiyah	40
	e. Konsep negara hukum dalam siyasah dusturiyah	42
BAB III	BAB III PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI KHAS BALI	
	A. Gambaran Umum Tentang Pemerintahan Provinsi Bali	45
	B. B. Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Khas Bali dalam Hierarki Perundang-undangan.....	52
BAB IV	TINJAUAN FIQH SIYASAH DUSTURIYAH TERHADAP PERATURAN GUBERNUR PROVINSI BALI NO. 1 TAHUN 2020 TENTANG TATA KELOLA MINUMAN FERMENTASI KHAS BALI MENURUT PERPRES NO. 39 TAHUN 2014	
	A. Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Khas Bali.....	64
	B. Korelasi Perpres No. 39 Tahun 2014 Tentang terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Khas Bali	66
	C. Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Peraturan Gubernur Provinsi Bali No. 1 Tahun 2020 tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi Khas Bali	69
BAB V	PENUTUP	
	A. Kesimpulan	74
	B. Saran.....	75
	DAFTAR PUSTAKA.....	77
	Lampiran	79

DAFTAR PUSTAKA

- Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan Terjemah*, (Semarang: CV Asy-Syifa, 2000.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Indonesia*, Jakarta, Balai Pustaka, 2003.
- Djafar, Wahyudi “*Menegaskan Kembali Komitmen Negara Hukum: Sebuah Catatan Atas Kecenderungan Devisit Negara Hukum di Indonesia*”, Jurnal Konstitusi Vol, 2010.
- Djazuli, A. Fiqh Siyasah ,*Implimentasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*, Jakarta: Kencana, 2004
- Djazuli, Acep *Fiqh Siyasah: Implementasi Kemaslahatan Umat Dalam Rambu Syariah* Jakarta: KENCANA, 2003
- Farihi, H. Zina, Qadzaf, dan Minuman Keras Dalam Perspektif Hukum Pidana Islam. *MIZAN*, (2015).
- HARTINI, S. *Studi Komparatif Hukum Pidana Islam Dan Hukum Positif Terhadap Sanksi Pidana Bagi Pelaku Makanan Dan Minuman Yang Mengandung Kadar Alkohol Yang Tidak Sesuai Dengan Standar Kesehatan* Doctoral dissertation, UIN RADEN FATAH PALEMBANG 2017.
- Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Iqbal, Muammad. *Fiqh Siayrasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, Jakarta: Prenemedia Group, 2014.
- Iqbal, Muhammad *Fiqh Siyasah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2007.
- Jindan, Khalid Ibrahim *Teori Politik Islam Telaah kritis Ibnu Taimiyah Tentang Pemerintahan Islam*, Surabaya: Risalah Gusti, 1995.
- Kahllaf, Abdul Wahhab *Al-Siyasah al-Syar'iyah*, Kairo: Dar al-Anshar, 1977.
- Ketetapan MPRS No.XX/MPRS/1966 Tentang Memorandum DPRGR mengenai Sumber Tertib Hukum Republik Indonesia dan Tata Urutan Peraturan Perundang-undangan Republik Indonesia.
- Manan, Bagir *Menyongvong Fajar Otonomi Daerah*, Yogyakarta: PSH FH UII, 2002
- Mertokusumo,.,*Sudikno Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: Liberty, 2008
- Peraturan Gubernur No. 1 Tahun 2020 Tentang Tata Kelola Minuman Fermentasi dan/atau Destilasi Khas Bali
- Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 Tentang Pengendalian dn Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran, dan Penjualan Minuman Beralkohol.
- Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2013 Tentang Pengendalian dan Pengawasan Minuman Beralkohol.

- Prof. H. A.Djazuli, *Fiqh Siyasah, "Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syari'ah"*, Jakarta: Kencana, 2004.
- Ranggawidjaja, Rosjidi. *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Bandung: Penerbit Mandar Maju, 1998.
- Saebani, Beni Ahmad *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam* Bandung: Pustaka Setia, 2008
- Saefulloh, A. *Narkoba dalam perspektif hukum Islam dan hukum positif:(sebuah studi perbandingan)* Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah 2007.
- Syarif Muijib Ibnu dan Khamami Zada, *Fiqh Siyasah Doktrin Dan Pemikiran Politik Islam*, PT.Gelora Aksara Pratama, 2008.
- Syarif, Amiroeddin *Perundang-undangan, Dasar, Jenis dan Teknik Membuatnya*, Jakarta: Bina Aksara, 1987.
- Dewi, Triwahyuni dan Fuqohah, *efektivitas jabatan pejabat pelaksana tugas (PLT.) dalam penyelenggaraan pemerintahan*, jurnal administrasi negara volume 3 nomor 2 tahun 2015.
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.
- Wahyudi, Yudian *Ushul Fikih Versus Hermeneutika*. Yogyakarta: Pesantren NAWESEEA Press, 2007.

UIN SUNAN AMPEL
SURABAYA